

Peranan Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Antar Kampung Di Kecamatan Dumoga Tengah (Study Kasus Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow)

**Frendio Tandayu¹
Fanley N Pangemanan²
Donald K. Monintja³**

Email Korespondensi: diotandayu021@gmail.com

ABSTRAK

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan konflik yang terjadi sering terjadi di Kecamatan Dumoga Tengah. Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial-politik. Konflik memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak positif dari konflik sosial adalah konflik tersebut memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan. Konflik yang terjadi di Indonesia. Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, di daerah ini terdapat beberapa wilayah yang cukup terkenal karena konflik yang terjadi didalamnya. Salah satunya Kecamatan Dumoga Tengah, yang berada diperbatasan antara Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Konflik yang sering terjadi didataran Dumoga selalu bermula dari masalah kecil dan kesalahpahaman hingga berlanjut dan mengakibatkan terjadinya konflik besar antar desa. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow tidak mengambil keputusan sendiri namun bersama dengan pihak kepolisian dan aparat Desa. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah, menghasilkan buah positif sehingga konflik yang terjadi dapat dihentikan, Dalam menanggulangi konflik antar kedua Desa, pemerintah serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengupayakan adanya pertemuan, pertemuan pertama yakni Forum Koordinasi Pimpinan Daerah bahkan dihadiri oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara

Kata Kunci : Peranan, Pemerintahan, Pencegahan, Konflik

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Kecamatan Dumoga Tengah baru-baru ini menjadi sorotan karena adanya konflik antara Desa Kosio dan Desa Doloduo yang cukup besar dan mengakibatkan adanya korban jiwa dan bahkan masyarakat setempat banyak yang pergi mengungsi ke desa lain. Konflik yang terjadi antara kedua desa ini merupakan sebuah kesalahpahaman namun karena memang antara kedua desa ini memang ada dendam lama maka terjadilah perpecahan yang memakan korban jiwa. Kejadian antara kedua desa ini berawal dari kesaksian palsu dari beberapa oknum dari desa Doloduo yang mengatakan bahwa mereka dihadang di desa Kosio kemudian dikeroyok dan dilempari batu, yang pada kenyataannya mereka mengalami kecelakaan di desa Kosio kemudian beberapa warga desa Kosio membantu membawa mereka ketempat praktik mantri yang berada di desa Doloduo untuk mendapatkan pertolongan. Namun dari ketiga oknum tersebut bersaksi palsu dengan mengatakan hal yang berbeda sehingga membuat warga desa Doloduo memberontak dan masuk kewilayah desa Kosio dengan berbagai macam senjata tajam hingga akhirnya terjadilah kericuhan dan menyebabkan 1 warga desa Kosio menjadi korban akibat perseteruan ini. Pemerintah kemudian langsung mengadakan pertemuan deklarasi perdamaian untuk kedua desa tersebut, namun dalam deklarasi perdamaian ini sebagian besar yang hadir adalah orang-orang dewasa dibandingkan dengan anak-anak muda. Sehingga yang disampaikan pemerintah pada kegiatan tidak didengar oleh mereka yang selalu menjadi awal mula dari konflik antar desa.

Konflik sosial yang terjadi di kecamatan Dumoga pada akhir-akhir ini, dapat bersumber dari berbagai faktor-faktor yang memengaruhi ketidakcocokan antar masyarakat. Seiring dengan pemahaman dan sensitivitas masyarakat

terhadap hak asasi manusia, apabila terjadi perlakuan yang dianggap melanggar hak asasi manusia setiap anggota masyarakat, maka dapat menyebabkan sebuah konflik antar masyarakat itu muncul. Pemerintah kecamatan dan desa juga telah melakukan sosialisasi dalam setiap kesempatan baik ditempat ibadah, pesta pernikahan, acara syukuran ulang tahun sampai pada acara kedukaan dengan harapan dapat didengar oleh pemuda, dan menjadi himbuan untuk orang tua dalam mengawasi anak-anaknya supaya tidak terlibat dalam konflik atau menyebabkan konflik yang terjadi karena sangat merugikan. Namun sayangnya dalam setiap sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah dapat dibilang sia-sia, karena yang menjadi sasaran utama dalam sosialisasi yaitu mereka yang sering terlibat dalam pertikaian dan konflik tidak pernah hadir dalam acara tersebut sehingga mereka tidak mendengar apa yang disampaikan pemerintah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta melaksanakan fungsi diantaranya Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi, pembinaan dan

pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;.

Berdasarkan fungsinya yaitu pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama ras dan golongan, serta menangani konflik sosial maka Badan Kesbangpol memiliki peran yang penting dalam pencegahan dan penanggulangan konflik yang terjadi di Kecamatan Dumoga Timur.

Penelitian Terdahulu

1) Peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Di Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow. Oleh Arianto Papatung, Michael Mamentu, Johny Lengkong. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Dumoga Tengah yaitu Pemerintah Kecamatan Dumoga. Penggalan data dan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Pemerintah Kecamatan. Selain di Kantor Kecamatan Dumoga Tengah Penulis juga meneliti dua lembaga dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Dinas Sosial dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan setidaknya terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya konflik antara lain, Pertikaian antar kelompok yang dikatikan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan, Pemerintah Kecamatan yang bertugas melindungi dan mengayomi warga ternyata belum dapat menemukan solusi yang pas dalam menangani perkelahian antar kelompok dan Beberapa tempat yang menjadi langganan konflik sama sekali tidak mendapatkan perhatian lebih untuk

dilihat faktor penyebab atau lingkungan yang membangun konflik di tempat tersebut.

2) Peranan pemerintah kecamatan dalam menangani konflik antar kampung di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. Oleh Candy Pingky Komaling, Sofia Pangemanan, Neni Kumayas. Dimuat dalam Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Pemerintah Dalam Menangani Konflik Antar Kampung di Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mogondow. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Kecamatan bekerjasama dengan Pemerintah Desa beserta Tokoh Masyarakat dalam upaya penanganan konflik dengan terlebih dahulu diselesaikan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai perdamaian, apabila tidak memungkinkan maka ditindaklanjuti melalui jalur hukum. Wilayah kecamatan Dumoga Barat dalam tiga tahun terakhir sudah aman, dalam artian tidak ada lagi konflik dalam skala besar yang terjadi. Dari hasil penelitian adapula beberapa upaya berbentuk kegiatan dan program yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dengan bekerjasama dengan beberapa pihak dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

3) Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Antarwarga Di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Oleh Raesa Oktavia, I Gede Sumerta KY, Eri Hidayat, Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan. Dimuat dalam Jurnal Damai dan Resolusi Konflik Desember 2019 Volume 5 Nomor 3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam penyelesaian konflik antarwarga di Kecamatan Johar Baru,

Jakarta Pusat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori peran, teori identitas sosial, teori konflik, dan teori resolusi konflik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih perlu ada optimalisasi peran dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah, baik itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Pemerintah Kota Jakarta Pusat masih belum tepat sasaran. Kurang optimalnya peranan pemerintah dalam menyelesaikan konflik tawuran antarwarga di wilayah Kecamatan Johar Baru ini dikarenakan upaya-upaya yang telah dilakukan hanya dapat menyelesaikan konflik dalam jangka pendek, dan masih meninggalkan kondisi negative peace, bukan positive peace.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini bisa memudahkan peneliti dalam mengambil data serta mengelolanya menjadi sebuah kesimpulan, dan yang menjadi fokus penelitian yakni bagaimana peran pemerintah dalam hal ini Badan Kesbangpol dalam mencegah dan menanggulangi konflik antar kampung di kecamatan dumoga tengah Metode Pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga kan mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Sugiyono (2016:244)..

Pembahasan

Sesuai dengan teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni teori Dimensi dalam manajemen menurut Wirawan tujuan manajemen konflik adalah :

- 1) Mencegah gangguan kepada anggota organisasi untuk memfokuskan diri pada visi, misi dan tujuan organisasi.
- 2) Memahami orang lain dan menghormati keberagaman.
- 3) Meningkatkan kreativitas.
- 4) Meningkatkan keputusan melalui pertimbangan berdasarkan pemikiran berbagai informasi dan sudut pandang.
- 5) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan melalui peran serta, pemahaman bersama, dan kerja sama.
- 6) Menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik

Peneliti mengetahui apa saja kejadian fakta yang terjadi dilapangan dan kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah. Maka sesuai fakta yang peneliti jumpai dilapangan dan dikaitkan dengan teori yang ada, maka penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Mencegah gangguan kepada anggota organisasi untuk memfokuskan diri pada visi, misi dan tujuan organisasi:

Untuk mencegah lebih lamanya konflik terjadi pemerintah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta dengan pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kepolisian membuat pencegahan dengan cara membuat kebijakan apabila terdapat masyarakat yang sifatnya memprovokasi keadaan untuk membuat terjadinya konflik maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian pihak-pihak tertentu yang menjadi provokator akan diamankan supaya masyarakat merasa aman dan tidak terprovokasi lagi.

- 2) Memahami orang lain dan menghormati keberagaman.

Pemerintah dalam poin yang kedua ini telah berupaya memahami dan

menghormati keinginan dari masyarakat, karena pemerintah mendengar langsung dan menyepakati keinginan masyarakat. Salah satunya adalah untuk menangkap pelaku pembunuhan dan memproses dengan seadil-adilnya, pemerintah bukan hanya mengiyakan begitu saja namun langsung bertindak dengan cepat sehingga pelaku langsung diamankan.

3) Meningkatkan kreativitas:

Dalam poin yang ketiga pemerintah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beserta dengan Pemerintah Daerah dapat dikatakan kreatif karena dengan cepat mampu mengambil alih hati dari masyarakat sehingga diselenggarakanlah deklarasi perdamaian.

4) Meningkatkan keputusan melalui pertimbangan berdasarkan pemikiran berbagai informasi dan sudut pandang.

Dalam poin yang keempat ini Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pihak Kepolisian dan Kepala Desa dari 2 Desa yang terlibat konflik tentu tidak sembarang mengambil keputusan sebelum deklarasi damai diselenggarakan dan ditandatangani. Namun mereka juga melihat dan mendengar dari 2 sudut pandang kemudian menilai sendiri apa yang telah terjadi dan awal mula yang sebenarnya seperti apa sebelum akhirnya mereka menetapkan kebijakan yang dianggap tidak merugikan kedua belah pihak.

5) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan melalui peran serta, pemahaman bersama, dan kerja sama.

Dalam poin kelima ini seperti yang sudah disampaikan Bapak Chriss selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bahwa mereka turut memfasilitasi kedua Desa, pertama dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk tugas jaga diperbatasan, kedua melakukan patroli, kemudian memfasilitasi pertemuan deklarasi damai yang diselenggarakan, dan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

6) Menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik

Dalam poin keenam ini yang adalah kunci keberhasilan dari Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Aparat Kepolisian dan Kepala Desa adalah mereka mampu membuat kebijakan yang sesuai dan tidak merugikan siapapun dari kedua Desa. Dalam menyelesaikan konflik mereka membuat pertemuan bukan hanya dengan pemerintah Desa namun dengan masyarakat yang ada supaya semua yang ada dan disampaikan dalam deklarasi damai dapat disaksikan langsung oleh masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan guna untuk mengakhiri konflik yang terjadi.

**Penutup
Kesimpulan**

- 1) Pemerintah Daerah serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow tidak mengambil keputusan sendiri namun bersama dengan pihak kepolisian dan aparat Desa. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah, menghasilkan buah positif sehingga konflik yang terjadi dapat dihentikan, Mencari inti dari permasalahan karena konflik ini dimulai dari satu dua orang dan kemudian diserahkan ke pihak kepolisian dan ditindaklanjuti berdasarkan hukum; Kepolisian menindaklanjuti sumber permasalahan berdasarkan hukum yang berlaku; Memberikan sosialisasi kepada kedua Desa khususnya masyarakat; Membuat perjanjian dan surat pernyataan perdamaian antara kedua Desa; Menangkap pelaku pembunuhan yang menjadi salah satu faktor penyebab membesarnya konflik; Mempersiapkan aparat kepolisian disetiap perbatasan, dan berpatroli sesuai dengan jam yang telah ditentukan.
- 2) Dalam menanggulangi konflik antar kedua Desa, pemerintah serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

mengupayakan adanya pertemuan, pertemuan pertama yakni Forum Koordinasi Pimpinan Daerah bahkan dihadiri oleh Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, namun malam harinya terjadi lagi pertikaian, namun dengan cepat dan tanggap pemerintah menyampaikan kebijakan kepada masyarakat dan melakukan pertemuan deklarasi damai sehingga ada poin penting yang disampaikan kepada masyarakat yaitu :*Apabila ada warga dari kedua desa melakukan pelanggaran hukum, maka pemerintah Desa bertindak kooperatif membawa yang bersangkutan ke Mapolsek; Pemerintah Desa bersama aparat kepolisian dan Babinsa, memberlakukan jam malam mulai pukul 10; Aparat kepolisian, Babinsa dan Pemerintah Desa bekerjasama melakukan sosialisasi terkait bahaya menggunakan lem ehabond dan Komix ke masyarakat; Aparat kepolisian, Babinsa dan Pemerintah Desa bekerjasama melaksanakan razia knalpot racing; Aparat kepolisian, Babinsa dan Pemerintah Desa bekerjasama melaksanakan Razia Miras; Aparat kepolisian, Babinsa dan Pemerintah Desa bekerjasama melaksanakan Razia Sajam*

Saran

- 1) Untuk Pemerintah Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Aparat Kepolisian, dan pemerintah Desa harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan dan tokoh-tokoh masyarakat desa dan harus sering melaksanakan sosialisasi bagi masyarakat khususnya Desa yang sering terjadi konflik agar masyarakat dapat lebih di bina. Sosialisasi ditujukan bukan hanya untuk anak muda tetapi juga dengan orang tua, sehingga orang tua juga dapat memberikan pemahaman kepada anak-anak mereka mengenai akibat yang ditimbulkan jika menyebabkan konflik terjadi. Pemerintah harus bertindak dengan tegas terkait dengan kebijakan yang diambil, bukan hanya saat konflik

terjadi saja namun bisa berlangsung secara terus menerus. Kemudian sudah sepatutnya pihak kepolisian melakukan patroli setiap harinya dijam tertentu supaya dapat menghindari jika ada pelanggaran yang terjadi disekitar, dan juga dapat melakukan pencegahan dengan pemasangan teknologi CCTV di tempat-tempat yang sering terjadi kekacauan.

- 2) Untuk masyarakat, dalam menghadapi konflik seperti yang sudah diketahui menimbulkan berbagai kerugian. Bahkan bisa mengakibatkan kehilangan orang yang kita sayangi. Maka dari itu masyarakat juga harus mendukung secara penuh kebijakan dari pemerintah dengan cara tidak melanggar kebijakan tersebut namun berusaha memperbaiki hubungan antar Desa, karena kalau terus-menerus terlibat dalam konflik maka yang merasakan kerugian adalah kita sendiri sebagai masyarakat.

Daftar Pustaka

- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2013, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Andarmoyo, Sulisty. 2012. Kebutuhan Dasar Manusia: Personal and Environment Hygiene. Ponorogo: Akedemi Keperawatan Universitas Muhammadiyah
- Badeni. (2014). Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi. Alfabeta.
- Effendy, Onong Uchjana. 2008. Dinamika Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Elly M.Setiadi. Usman Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi : Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial:Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya. Jakarta: Prenada Media Group
- Husaini, Usman.2009. Metodologi Penelitian Sosial.Jakarta : Bumi Aksara
- Kencana Syafie, 2011. Etika Pemerintahan. Jakarta : Rineka Cipta

- Labolo, Muhadam. 2007. Memahami Ilmu Pemerintahan, Jakarta : Kelapa Gading Permai.
- Lestari, Sri. (2012). Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga. Jakarta: Kencana.
- Mahmuzar, M.Hum. 2010. Sistem Pemerintahan Indonesia. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubin. 2009. Teori Konflik Sosial. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Raho, Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta : Prestasi Pustaka
- Robbins, Stephen P. dan Judge, Timothy A. 2015. Perilaku Organisasi. Edisi 16. Terjemahan oleh Ratna Saraswati dan Febriella Sirait. 2015. Jakarta: Salemba Empat
- Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan, Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2009
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2015. Teori-teori psikologi sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soejono. 2012 Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet
- Sunyoto, Danang. 2015. Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.
- Tjandra, W. Riawan, 2009, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Wahyudi. (2017). Manajemen Konflik dan Stres dalam Organisasi Pedoman Praktis bagi Pemimpin Visioner (H. Akdon Ed.). Bandung: Alfabeta.
- Wirawan. (2009). Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Penelitian. Jakarta. Penerbit: Salemba Empat.
- Wirawan. 2010. Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sumber Lain :
- Hasan Mukmin, Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Ed. Ke-3, Cet. Ke- 4,
- Irawan D. Membangun Perdamaian di Sambas; Peace Building Pasca Konflik Etnik Masyarakat Melayu Kabupaten Sambas Tahun 1999 Jilid 2. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=list_works&hl=id&hl=id&user=ZkwSSywAAAAJ
- Jurnal :
- Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Arianto Paputungan, Michael Mamentu, Johny Lengkong. Peranan Pemerintah Kecamatan Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Konflik Di Kecamatan Dumoga Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. Oleh Candy Pingky Komaling, Sofia Pangemanan, Neni Kumayas. Peranan pemerintah kecamatan dalam menangani konflik antar kampung di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Jurnal Damai dan Resolusi Konflik Desember 2019 Volume 5 Nomor 3. Oleh Raesa Oktavia, I Gede Sumerta KY, Eri Hidayat, Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Antarwarga Di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusa